

**KINERJA APARATUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBINAAN PELAKU UMKM
(Studi Pada Pelaku UMKM Jajan Pasar Binaan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**SUCIA WATI
NPM. 1916021003**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KINERJA APARATUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBINAAN PELAKU UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM Jajan Pasar Binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung)

Oleh

SUCIA WATI

Pelaku UMKM jajan pasar di Kota Bandar Lampung masih memiliki permasalahan seperti kurangnya SDM, produksi yang masih terbatas, pengemasan yang kurang menarik, pemasaran yang belum meluas, kurangnya modal, dan belum menggunakan teknologi modern dalam pengelolaan usahanya. Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan usaha, oleh karena itu Pemerintah Kota Bandar Lampung menjembatani pelaku UMKM untuk tergabung dalam kegiatan *Business Development Center* (BDC) yaitu kegiatan untuk memfasilitasi pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usahanya dengan produktif, kuat dan menjamin keberlanjutan. Dinas yang terlibat dalam kegiatan BDC salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Kinerja Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pelaku UMKM Jajan Pasar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pelaku UMKM Jajan Pasar yang diukur menggunakan teori kinerja menurut Robbins 2006 (dalam Lie, dkk., 2018:2) yang mencakup 5 Indikator yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian. Secara keseluruhan dinilai optimal, indikator kualitas kerja dinilai optimal karena aparaturnya memiliki kemampuan dalam bekerja, indikator kuantitas kerja dinilai optimal karena aparaturnya telah bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, indikator ketepatan waktu dinilai tidak optimal karena waktu pembinaan tidak sesuai dengan jadwal, indikator efektivitas dinilai optimal karena kegiatan pembinaan telah menggunakan sumber daya berupa tenaga, uang, teknologi dan bahan baku dan kegiatan tersebut mampu mencapai tujuannya, dan indikator kemandirian dinilai optimal karena aparatur telah menjalankan fungsi sesuai dengan komitmen kerja.

Kata Kunci: Kinerja Aparatur, Pelaku UMKM, Kota Bandar Lampung

ABSTRACT

PERFORMANCE OF COMMUNITY EMPOWERMENT SERVICE APPARATUS CITY OF BANDAR LAMPUNG IN FOSTERING UMKM ACTORS (Study on UMKM Entrepreneurs of Market Snacks Assisted by the Department of Community Empowerment of Bandar Lampung City)

By

SUCIA WATI

MSME players in Bandar Lampung City still have problems such as lack of human resources, limited production, less attractive packaging, marketing that has not expanded, lack of capital, and have not used modern technology in managing their business. These problems greatly affect business development, therefore the Bandar Lampung City Government bridges MSME players to join in Business Development Center (BDC) activities, namely activities to facilitate MSME players to be able to develop their businesses productively, strongly and ensure sustainability. One of the offices involved in BDC activities is the Bandar Lampung City Community Empowerment Office.

The purpose of this research is to describe the Performance of the Apparatus of the Community Empowerment Service of Bandar Lampung City in Coaching MSME Players in Jajan Pasar. This research uses a qualitative research type with a descriptive approach, with data collection techniques of interviews and documentation.

The results of this study indicate that the Performance of the Bandar Lampung City Community Empowerment Service Apparatus in Coaching Market Snack UMKM Actors as measured using the performance theory according to Robbins 2006 (in Lie, et al., 2018: 2) which includes 5 indicators, namely work quality, work quantity, timeliness, effectiveness and independence. Overall it is considered optimal, the work quality indicator is considered optimal because the apparatus has the ability to work, the work quantity indicator is considered optimal because the apparatus has worked in accordance with applicable regulations, the timeliness indicator is considered not optimal because the coaching time is not in accordance with the schedule, the effectiveness indicator is considered optimal because the coaching activities have used resources in the form of energy, money, technology and raw materials and these activities are able to achieve their goals, and the independence indicator is considered optimal because the apparatus has carried out functions in accordance with work commitments.

Keywords: Apparatus Performance, UMKM Actors, Bandar Lampung City

**KINERJA APARATUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBINAAN PELAKU UMKM
(Studi Pada Pelaku UMKM Jajan Pasar Binaan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung)**

Oleh

SUCIA WATI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **KINERJA APARATUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBINAAN PELAKU UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM Jajan Pasar Binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Sucia Wati**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916021003**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP. 196007291990101001

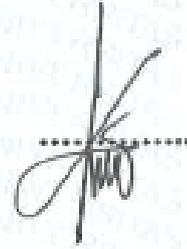
2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.L.P.
NIP 196112181989021001

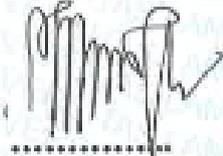
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.



Penguji : Dr. Maulana Mukhlis, Sos., M.L.P.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Juni 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Sucia Wati
NPM. 1916021003

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Purawiwitan, Lampung Barat pada tanggal 07 Juni 2001, merupakan putri pertama Bapak Ujang Karta dan Ibu Farida, anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis memulai jengjang pendidikan di SDN 1 Mekar Jaya Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2007-2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Gedung Surian pada tahun 2013-2016, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kebun Tebu yang selesai pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjalani perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi FSPI (Forum Studi Pengembangan Islam) pada tahun 2019 dan menjabat sebagai humas dan aktif mengikuti organisasi KOPMA (Koprasi Mahasiswa) pada tahun 2019 dan menjabat sebagai humas.

Penulis melaksanakan pengabdian masyarakat pada bulan Januari hingga Februari tahun 2022 melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari di Pekon Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2022 penulis melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) melalui program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM) selama lima bulan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al Insyirah:5)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS Al Baqarah:286)

“Jangan takut gagal karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah
orang yang tidak pernah melangkah”

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Ku Persembahkan Karya Ini
Kepada

Bapak dan Ibu tercinta
Ujang Karta dan Farida (Alm)

Terima kasih kepada kedua orang tuaku yang telah dengan sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, serta mendoakanku, memberikan kasih sayang yang tiada habisnya, yang menjadi motivator utama ku dalam meraih gelar sarjana, sehingga karya ini dapat ku persembahkan semoga karya ini dapat membuat bangga dan bahagia.

Adik-Adikku tersayang
Gusti Karisa Putri, dan Keysha Putri Faradela

Terima kasih atas semangat, doa dan kasih sayang yang telah kalian berikan.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahilahirabil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KINERJA APARATUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBINAAN PELAKU UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM Jajan Pasar Binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung)" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D. E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan penelitian ini;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si., selaku pembimbing penulis yang telah mengarahkan, memberikan saran selama proses bimbingan skripsi. Terima kasih atas kesabaran, ilmu, arahan serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan dimanapun bapak berada;

5. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P., selaku dosen pembahas. Terima kasih karena telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan dimanapun bapak berada;
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas segala ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan dimanapun ibu berada;
7. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di masa kini dan di masa yang akan datang serta staf jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu kelancaran administrasi;
8. Kedua orang tuaku, Bapak Ujang Karta dan Ibu Farida (Alm) terima kasih atas segala kesabaran, dukungan, doa serta segala upaya yang terbaik bagi kesuksesan masa depan anak-anaknya. Untuk bapak terima kasih semoga Allah SWT., selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang, untuk ibu terima kasih atas pengorbanan yang begitu besar semoga tenang di surganya Allah SWT., maafkan aku selama ini belum bisa membuatmu bangga, Doakan agar aku mampu membahagiakan dan membanggakan bapak dan ibu selalu. Aamiin;
9. Kepada ibu sambungku ibu Ani, terima kasih atas kelapangan hati yang telah menerima kami, menganggap dan merawat kami selayaknya anak kandung. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan memberikan kemudahan atas segala urusan. Doakan aku agar mampu membuatmu bangga;
10. Terima kasih kepada adikku Gusti Karisa Putri, dan Keysha Putri Faradela atas dukungan dan semangat yang telah diberikan, tetap semangat untuk mengejar mimpi walaupun sesulit apapun jalan yang harus dilewati sehingga kita mampu membahagiakan orang tua kita;

11. Seluruh informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi guna menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Bapak Drs. Jai-nuddin M.I.P., Bapak Boni Supriatna, M.M., Ibu Etty Yuliarna, Sos. MM., Ibu Seftiana, Ibu Sadaria, Ibu Selda Ertanti, Ibu Septiana Sutarman, Ibu Eli Suwarni, Ibu Melani Vilanda, Ibu Pipit Dian Palupi, atas waktu dan informasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penelitian ini terselesaikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun kalian berada;
12. Untuk keluarga besar ku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua doa, dukungan, semangat dan bantuan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan bagi kita semua;
13. Seluruh aparaturnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, terima kasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama program MBKM;
14. Terima kasih kepada Yoga Saputra yang senantiasa telah memberikan dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka dari awal pendaftaran perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;
15. Terima kasih kepada teman seperjuanganku Herlina Juwita, Vera Pertiwi dan Sinta Nuryati. Terima kasih atas dukungan, masukan, bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis serta selalu menemani penulis hingga sekarang. Jangan putus semangat untuk mencapai kesuksesan kedepannya. Semoga persaudaraan dan silaturahmi kita selalu terjaga dan semoga Allah SWT., selalu memberikan kesehatan dan kesuksesan dimanapun kalian berada;
16. Teman dekat di jurusan Ilmu Pemerintahan selama masa perkuliahan sekaligus teman magang selama 5 bulan Riska Ika Yulia dan Yolanda Putri Terima kasih atas cerita, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Tetap semangat mengejar cita-cita dan semoga kita diberikan kesuksesan selalu;
17. Teman-teman KKN selama 40 hari Hilda Ratna Dwi, Cindy Nur Rohma, Marfuah dan Rutmaida Boru Hombing. Terima kasih atas cerita, dukungan

dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Tetap semangat mengejar cita-cita dan semoga kita diberikan kesuksesan selalu;

18. Untuk seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman di masa perkuliahan. Selalu semangat meraih impian dan semoga kita diberikan kesuksesan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun kalian berada;
19. Kepada diri sendiri terima kasih telah kuat untuk tetap melanjutkan perkuliahan, meskipun banyak sekali rintangan dan keterbatasan serta sempat memiliki pikiran untuk berhenti kuliah, terima kasih telah percaya bahwa Allah SWT., selalu ada untuk hambanya;

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Bandar Lampung, 11 Juni 2023
Penulis

Sucia Wati

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Kinerja	10
2.1.1. Konsep Kinerja	10
2.1.3. Teori Kinerja.....	10
2.1.4. Karakteristik Kinerja Pegawai atau Aparatur	13
2.1.5. Penilaian Kinerja.....	13
2.1.6. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja	14
2.2. Tinjauan UMKM.....	14
2.2.1. Konsep UMKM	14
2.2.2. Pengertian UMKM Jajan Pasar.....	15
2.2.3. Ruang Lingkup UMKM.....	15
2.2.4. Prinsip Pemberdayaan UMKM.....	16
2.2.5. Kriteria UMKM	16
2.3. Kerangka Pikir	17
III. METODE PENELITIAN	20
3.1. Tipe Penelitia	20
3.2. Lokasi Penelitian.....	21
3.3. Fokus Penelitian.....	21
3.4. Sumber Data.....	22
3.5. Informan Penelitian.....	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7. Teknik Pengolahan Data	30

3.8. Teknik Analisis Data.....	31
3.9. Teknik Validasi Data	33
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
4.1. Gambaran Umum Pembinaan UMKM dan Tujuan Adanya Pembinaan Pelaku UMKM Jajan Pasar	35
4.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	36
4.3. Tujuan dan Sasaran Tugas Fungsi Pokok	36
4.4. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	37
4.5. <i>Business Development Center</i> (BDC).....	38
4.6. Tujuan Adanya <i>Business Development Center</i> (BDC).....	38
4.7. Kegiatan Pembinaan Yang dilakukan Oleh Dinas PMK Bandar Lampung dan BDC	39
4.8. Kegiatan Pengembangan Usaha Pelaku UMKM di Bandar Lampung ...	40
4.7. Sumber Keuangan Komite BDC Bandar Lampung	41
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
5.1. Kinerja Aparatur Dalam Indikator Kualitas Kerja.....	42
5.2. Kinerja Aparatur Dalam Indikator Kuantitas Kerja.....	46
5.3. Kinerja Aparatur Dalam Indikator Ketepatan Waktu	51
5.4. Kinerja Aparatur Dalam Indikator Efektivitas.....	54
5.5. Kinerja Aparatur Dalam Indikator Kemandirian	61
VI. SIMPULAN DAN SARAN	67
6.1. Simpulan	67
6.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	3
2. Informan Penelitian	24
3. Dokumentasi Mengenai 5 Indikator Kinerja Menurut Robbins.....	39
4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	37
5. Triangulasi Data Penelitian	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	20
2. Dokumentasi Indikator Kualitas Kerja.....	45
3. Peringatan Mengisi Tanda Kehadiran	48
4. Sidak Kehadiran ASN Pemerintah Kota Bandar Lampung	49
5. Dokumentasi Indikator Kuantitas Kerja.....	50
6. Dokumentasi Indikator Ketepatan Waktu	53
7. Taman UMKM Bung Karno	56
8. Pendampingan Kepada Pelaku UMKM	57
9. Dokumentasi Indikator Efektivitas.....	59
10. Dokumentasi Indikator Kemandirian.....	63

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BDC	: <i>Business Development Center</i>
KABID	: Kepala Bidang
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PMK	: Pemberdayaan Masyarakat Kota
SDM	: Sumber Daya Manusia
TUPOKSI	: Tugas Pokok Fungsi
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya (Rudjito, 2003:3). Definisi tersebut terbukti pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998-1999 yang memicu turunnya perekonomian Indonesia, hal ini berpengaruh pada usaha bersekala besar yang mengalami kemerosotan, namun sebagian besar UMKM tetap berjalan bahkan jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Kuatnya UMKM juga didukung oleh struktur permodalan yang lebih banyak bergantung pada modal sendiri yaitu sebanyak (73%), bank swasta (4%), bank pemerintahan (11%), dan pemasok (3%) (Niode, 2009:2).

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Sikaping, Ikasari Heniyantun menyampaikan dua tujuan dari UMKM, pertama bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kedua, bertujuan untuk meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu dengan adanya UMKM masyarakat akan saling menjaga agar tetap sejahtera (Kemenkeu.go.id).

Indonesia tercatat memiliki 65,5 unit UMKM pada tahun 2019, jumlah itu meningkat 1,98% dibandingkan pada tahun 2018 yang sebanyak 64,2 juta unit. Jika dirinci maka jumlah usaha mikro pada tahun 2019 mencapai 64,6 ribu unit, usaha kecil sebanyak 798,7 ribu unit, sementara usaha menengah sebanyak 65,5 ribu unit. Adapun jumlah UMKM tersebut setara dengan

99,99% dari total unit usaha di dalam negeri. UMKM juga menyerap 119,6 juta orang atau 96,92% dari total tenaga kerja Indonesia angka ini meningkat 2,21% dari tahun sebelumnya (databoks.katadata.co.id).

Indonesia memiliki ragam kekayaan kuliner yang sebagian besar dipakai sebagai objek usaha kuliner salah satunya kue tradisional yang biasa disebut dengan jajan pasar, jajan pasar merupakan kudapan khas tradisional yang masih memiliki banyak penggemar dan biasanya diperjual belikan di pasar tradisional, tidak hanya itu jajan pasar juga masih sering ditemui diberbagai acara seperti acara seminar, rapat, pengajian dan lain sebagainya yang disajikan sebagai snak, hal ini membuktikan bahwa jajan pasar tetap ada di zaman sekarang yang sudah serba modern, selain harganya yang lebih murah jajan pasar juga cocok disajikan dalam segala acara.

Mengingat zaman yang terus berkembang membuat para pelaku UMKM dituntut mengikuti perkembangan zaman tersebut, seperti menguasai teknologi dalam segala bidang pengelolaan usahanya, tidak sedikit para pelaku UMKM yang belum menguasai hal tersebut sehingga menyebabkan ketertinggalan oleh para pelaku UMKM lain. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang dan kerkeadilan (Laporan Akhir Kegiatan Dinas PMK, 2021:1).

Pemberdayaan UMKM juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) pada bab VIII pasal 25 mengenai kemitraan yang menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan, menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan dengan

UMKM melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Kewajiban pemerintah untuk melakukan pemberdayaan bagi pelaku UMKM, di Kota Bandar Lampung salah satu dinas yang ikut berperan dalam pemberdayaan UMKM adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota (PMK) Bandar Lampung. Dinas PMK Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat di bidang UMKM karena tercatat dalam keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor. 358/III.12/HK/2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Dibidang Pemberdayaan Kelurahan Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021. Dinas PMK Bandar Lampung termasuk salah satu Dinas yang terpilih untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan tersebut.

Jumlah pelaku UMKM yang menjadi binaan Dinas PMK Bandar Lampung sebanyak 120 pelaku UMKM dari bidang yang berbeda, sebagian besar UMKM ini berbasis *home* industri atau industri rumahan atau bisa juga disebut dengan industri rumah tangga. Berikut daftar UMKM binaan Dinas PMK Bandar Lampung.

Tabel 1. Daftar UMKM Binaan Dinas PMK Bandar Lampung

No	Bidang UMKM	Jumlah Pelaku Usaha
1	Produk Olahan Roti	22 Pelaku Usaha
2	Jajan pasar	37 Pelaku Usaha
3	Produk Olahan Ikan	32 Pelaku Usaha
4	Produk Olahan Kopi	9 Pelaku Usaha
5	Seni Kriya	20 Pelaku Usaha
	JUMLAH	120 Pelaku usaha

Sumber: Buku Laporan Akhir Kegiatan Dinas PMK Bandar Lampung, 2021

Bidang jajan pasar merupakan satu bidang dengan anggota terbanyak dan bidang jajan pasar juga termasuk produk unggulan dari kegiatan BDC karena saat ini penjualannya sudah merambah dunia perhotelan (radarlampung.disway.id). Pemerintah akan selalu berusaha untuk terus mengembangkan kegiatan UMKM karena UMKM merupakan penunjang perekonomian saat ini. Usaha yang diambil dalam pemberdayaan UMKM adalah dengan pembinaan terhadap pelaku UMKM.

Dinas PMK Bandar Lampung merupakan bagian dari aplikasi inti otonom yang mengelola masalah pemberdayaan masyarakat kelurahan dan pengelolaan kependudukan di bawah tanggung jawab Walikota melalui sekretaris kecamatan. Dinas PMK Bandar Lampung memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (Laporan Akhir Dinas PMK). Dinas PMK Bandar Lampung memiliki tugas untuk dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam menjaga kesejahteraan pada bidang pemberdayaan, pemberdayaan tersebut akan berkualitas apabila terdapat kinerja yang baik dari aparaturnya, kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atau aparatur yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2013:67).

Kinerja aparatur pemerintah Dinas PMK Bandar Lampung memiliki peran penting dalam pengukuran keberhasilan pemberdayaan disegala bidang yang ada, salah satunya adalah pemberdayaan UMKM dengan menggelar kegiatan pembinaan bagi 120 pelaku UMKM. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan yang ada di dalam masyarakat, maka untuk tercapainya tujuan dari pembinaan perlu adanya program yang disusun oleh aparatur dinas setempat. Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan pembinaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri, inovatif dan kosmopolitan atau masyarakat yang terbuka sehingga dapat hidup bersama tanpa memandang identitas (Sutarto, 2007:153).

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas PMK Bandar Lampung adalah menggelar pembinaan untuk para pelaku UMKM. Program ini memiliki tujuan besar untuk suatu wilayah diantaranya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai tambahan pendapatan bagi para pelaku UMKM, pengurangan tingkat pengangguran, dan dapat mempererat tali silaturahmi antar masyarakat.

UMKM sangat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia, disisi lain UMKM menjadi tempat yang mewadahi orang-orang kreatif dalam penciptaan lapangan kerja, dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar memungkinkan UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia (Fadilah, dkk., 2021:894). Oleh karena itu, UMKM merupakan aset nasional dan dapat dipandang sebagai potensi terbesar daerah. Pembinaan UMKM juga diartikan sebagai bentuk pemerataan pembangunan. Penguatan UMKM tidak hanya ditujukan pada pembangunan di tingkat pusat, tetapi juga merupakan bagian dari program pembangunan daerah yang idealnya masuk dalam rencana pembangunan daerah (Lathifah, 2019:7).

Pembinaan merupakan pemberian peralatan, bimbingan dan dukungan dalam proses pengembangan. Pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan usaha yang dijalankan oleh stakeholder tertentu, dalam hal ini yaitu Dinas PMK Bandar Lampung. Pembinaan UMKM dapat dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan UMKM, menyusun program pembinaan dan pengembangan yang membahas permasalahan UMKM, melaksanakan program pembinaan yang telah disusun, dan memantau kegiatan program pembinaan serta pengembangan UMKM, dalam konsultasi dan pengembangan UMKM, ruang lingkup konsultasi meliputi bidang produksi, manajemen pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi.

Sebelum adanya kegiatan pembinaan terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM jajan pasar binaan Dinas PMK Bandar Lampung yang mempengaruhi perkembangan usaha, diantaranya kurangnya

SDM kurangnya pengetahuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha, produksi yang masih terbatas, pengemasan yang kurang menarik, pemasaran yang belum meluas karena belum tersedianya pasar yang dikhususkan untuk para pelaku UMKM menjual produknya, kurangnya modal karena sebagian besar pelaku UMKM menggunakan modal sendiri, dan kurang diterapkan teknologi modern dalam pengelolaan UMKM seperti belum mengenal alat vakum makanan dan belum memasarkan produknya secara *online*, karena sebelumnya para pelaku UMKM hanya memasarkan produk olahannya di pasar tradisional dan hanya mengandalkan pesanan dari orang terdekat (Profil BDC Kota Bandar Lampung, 2021: lampiran buku)

Permasalahan yang muncul tersebut mengakibatkan UMKM khususnya yang bergerak pada bidang jajan pasar membutuhkan pembinaan dari dinas terkait agar dapat melahirkan SDM yang semakin berkualitas sehingga UMKM jajan pasar dapat semakin berkembang dan maju. Kinerja aparatur Dinas PMK Bandar Lampung diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM jajan pasar baik permasalahan manajemen bisnis yang kurang baik, tahap produksi dan pemasaran produk yang belum meluas.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti membandingkan penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang dinilai relevan:

Pertama, berupa jurnal yang ditulis oleh Aulia (2020) dengan judul “Kinerja Dinas Koperasi UKM Dan Tenaga Kerja Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Banjarbaru” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja menurut Agus Dwiyanto (2008) yang mencakup 5 indikator diantaranya produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja yang diberikan oleh dinas koperasi UKM dan tenaga kerja cukup baik dilihat dari indikator produktivitas, kualitas pelayanan, responsive dan akuntabilitas.

Kedua, berupa jurnal yang ditulis oleh Sina dan Tefa (2020) dengan judul “Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pelestarian Tenun Ikat Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori kinerja menurut Dwiyanto dalam Sembiring (2012:98). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah cukup baik, hal ini dilihat dari indikator produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, meskipun demikian kinerja aparatur Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan lagi.

Ketiga, berupa jurnal yang ditulis oleh Ropinus (2016) dengan judul “Kinerja Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Pontianak” penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja menurut Dwiyanto (dalam Pasolong, 2010:178) yang mencakup lima indikator diantaranya produktivitas, isu kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur dekranasda belum optimal dikarenakan belum berjalan sesuai yang ditargetkan serta Sumber Daya Manusia yang belum menjalankan tugasnya secara optimal.

Keempat, berupa jurnal yang ditulis oleh Syahirul Alim, dkk., (2019) dengan judul “Kinerja Dinas Koperasi Dan UMKM” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori kinerja pegawai menurut Robbins (1996) yang menyatakan kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor intra personal yang meliputi motivasi, persepsi peranan dan kemampuan atau kompetensi individu yang bersangkutan. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja pegawai dibidang koperasi dan UMKM masih rendah, dikarenakan tingkat kedisiplinan aparatur rendah dan program evaluasi kinerja belum berjalan dengan efektif.

Kelima, berupa jurnal yang ditulis oleh Florita, dkk., (2019) dengan judul “Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Padang” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori pembinaan yang terdiri dari bidang produksi dan pengolahan, bidang pemasaran, SDM, dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan UMKM yang dilakukan oleh aparatur Dinas Koperasi dan UMKM dirasa belum maksimal karena kurangnya tenaga profesional, masih terdapat kendala seperti kurangnya tingkat produksi, tidak adanya wadah untuk memasarkan produknya, dan terdapat kesadaran yang kurang untuk seluruh pelaku UMKM pada saat mengikuti pembinaan.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian dan wilayah yang diteliti, penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada Kinerja Aparatur Dinas PMK Bandar Lampung dalam Pembinaan Pelaku UMKM Jajan Pasar yang diukur menggunakan teori Kinerja menurut Robbins 2006 (dalam Lie, dkk., 2018:2) begitu juga dengan lokasi yang dipilih yaitu di kantor Dinas PMK Bandar Lampung dan beberapa wilayah Kelurahan Kota Bandar Lampung karena pelaku UMKM jajan pasar yang mengikuti kegiatan pembinaan tersebut bertempat tinggal di kelurahan yang berbeda-beda. Dengan demikian peneliti tertarik mengambil judul “Kinerja Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Dalam Pembinaan Pelaku UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM Jajan Pasar Binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang hendak dikaji oleh peneliti melalui penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kinerja Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pembinaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, bahan referensi dalam ilmu pemerintahan, khususnya kegiatan Pemerintah dalam pembinaan UMKM.

b. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan partisipasi pemikiran terhadap Aparatur Dinas PMK Bandar Lampung dalam Pembinaan pelaku UMKM, dan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan yang mendalam kepada masyarakat Kota Bandar Lampung terkait kinerja aparatur Dinas PMK Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku UMKM. Harapannya penelitian ini mampu menjadi acuan untuk seluruh aparatur agar selalu menjaga kualitas kinerjanya dalam semua pemberdayaan yang dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Kinerja

2.1.1. Konsep Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atau aparatur atau pegawai yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2013:67). Sedangkan menurut (Sutrisno, 2010:171) kinerja karyawan adalah prestasi yang diperoleh seseorang dalam melakukan tugas, keberhasilan organisasi tergantung pada kinerja para pelaku organisasi yang bersangkutan. Selain itu kinerja pegawai juga dikatakan sebagai capaian kerja seseorang yang dibuktikan dengan fakta yang akurat (Wibowo, 2010:7).

2.1.2. Teori Kinerja

Teori kinerja menurut Robbins 2006 (dalam Lie, dkk., 2018:2) terdapat 5 indikator untuk menilai kinerja karyawan atau aparatur, diantaranya:

1. Kualitas kerja

Yang dimaksud dengan kualitas kerja adalah ketuhan pekerjaan, yang didasarkan pada keterampilan dan kemampuan karyawan serta persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan, kualitas kerja juga dihubungkan dengan tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanannya.

Keterampilan dan kemampuan yang dimaksud dalam definisi di atas diartikan sebagai kapasitas individu untuk melakukan berbagai tugas dalam pekerjaan, ini adalah penilaian tentang apa yang dapat dilakukan seseorang, kemampuan individu pada dasarnya terdiri dari

dua set keterampilan yaitu intelektual dan fisik Robbins,1995 (dalam Megantoro, 2015:4).

Kemampuan/keterampilan intelektual diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berfikir, menalar, dan memecahkan masalah. Sedangkan keterampilan fisik merupakan keterampilan tertentu yang bermakna penting bagi keberhasilan pekerjaan yang kurang membutuhkan keterampilan dan lebih berstandar Robbins, 2009 (dalam Askolani, 2016:38).

Persepsi kerja diartikan sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka Robbins, 2003 (dalam Soemanagara, 2006:272). Dan Kepuasan masyarakat diartikan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang dihasilkan dari membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dari produk/layanan jasa dengan harapannya (Atmaja, 2018:51)

2. Kuantitas kerja

Kuantitas kerja dinyatakan sebagai seberapa lama seorang aparatur bekerja setiap harinya. Kuantitas kerja berkaitan juga dengan kedisiplinan aparatur, disiplin kerja merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dengan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan 2017:195). Dalam penelitian ini lama kerja seorang aparatur setiap harinya akan diukur sesuai atau tidak dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

3. Ketepatan waktu

Ketepatan Waktu merupakan penilaian sesuai atau tidaknya dengan waktu yang direncanakan, dikatakan sesuai apabila suatu kegiatan berlangsung sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan dan dikatakan tidak sesuai apabila suatu kegiatan berlangsung tidak sesuai pada waktu yang sudah direncanakan. Pengukuran ketepatan

waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan.

4. Efektivitas

Diartikan sebagai tingkatan penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, dan bahan baku) yang dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya, atau dikatakan sebagai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau pencapaian suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Tenaga yang dimaksud pada definisi di atas adalah tenaga kerja yakni setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat (UU No. 13 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2).

Bahan baku yang dimaksud dalam definisi di atas dengan konteks pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dan pihak BDC diartikan sebagai bahan atau komponen yang dibeli dan digunakan untuk kegiatan tersebut. Yang termasuk dalam bahan baku pada kegiatan pembinaan pelaku UMKM jajan pasar diantaranya tepung terigu, gula, margarin, telur, tepung roti, kulit lumpia dan lain sebagainya yang digunakan untuk bahan praktik pembuatan produk olahan jajan pasar.

5. Kemandirian

Didefinisikan sebagai sikap seorang aparatur yang kedepannya akan menjalankan fungsi kerja sesuai dengan komitmen kerja, atau dapat dikatakan sebagai tingkatan karyawan/aparatur yang memiliki komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap instansinya, komitmen kerja diartikan sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaannya dalam organ-

isasi tersebut, sedangkan tanggung jawab karyawan diartikan sebagai sikap yang ditunjukkan oleh seseorang karyawan untuk memenuhi atau melaksanakan tugas dan peraturan yang sudah ditentukan.

Teori di atas akan menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja aparatur Dinas PMK Bandar Lampung, jika seluruh indikator tersebut terpenuhi maka kinerja aparaturnya dinyatakan optimal dan jika terdapat indikator yang tidak terpenuhi maka dapat dikatakan kinerja aparaturnya tidak optimal.

2.1.3. Karakteristik Kinerja Pegawai atau Aparatur

Menurut Mangkunegara 2002 dalam (Silaen, dkk., 2021:6) Kinerja pegawai yang baik memiliki karakteristik diantaranya:

1. Memegang teguh kewajibannya sebagai pegawai.
2. Segala sesuatu yang dihadapi selalu dipertanggung jawabkan.
3. Memiliki tujuan yang jelas.
4. Bersedia memperjuangkan tujuan yang akan dilaksanakan.
5. Seluruh kegiatan diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat.
6. Rencana yang telah disusun mampu dilaksanakan.

2.1.4. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja terhadap aparatur atau karyawan disuatu instansi dilakukan dengan evaluasi terhadap karyawan yaitu dengan cara membandingkan penampilan, cara kerja, ketepatan waktu antar karyawan satu dengan karyawan lainnya (Silaen dkk., 2021:7).

Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan penilaian kinerja menjadi penting dalam suatu instansi :

1. Setiap karyawan mampu mengembangkan kinerja masing-masing dalam suatu instansi.
2. Semua karyawan yang bekerja dengan baik berharap mendapat penghargaan.
3. Semua karyawan pasti menginginkan penilaian yang baik terhadap cara kerjanya.

2.1.5. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Terdapat beberapa tujuan dan manfaat yang dihasilkan dari penilaian kinerja menurut Mangkuprawira dalam (Silaen 2021:17) :

1. Perbaikan Kinerja

Dengan adanya penilaian kinerja, pegawai atau karyawan akan selalu meningkatkan kinerjanya.

2. Penyesuaian Kompensasi

Penilaian kinerja dapat dijadikan indikator dalam kenaikan gaji, pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya.

3. Keputusan Penempatan

Penilaian kinerja juga dapat dijadikan acuan dalam kenaikan maupun penurunan jabatan.

4. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan

Hanya kinerja karyawan yang buruk yang memerlukan pelatihan dan pengembangan maka dari itu seluruh karyawan di harapkan mampu mengembangkan diri.

2.2. Tinjauan UMKM

2.2.1. Konsep UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berdasar Undang-Undang No. 20 tahun 2008 :

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik swasta dan/atau perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai, atau ikut serta dalam usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi definisi tersebut.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dikelola oleh orang perseorangan atau kesatuan ekonomi yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari usaha yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau dilibatkan oleh usaha kecil atau besar.

Kewirausahaan besar adalah kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan hukum yang kekayaan bersihnya atau pendapatan penjualan tahunannya lebih besar daripada usaha menengah, termasuk badan usaha milik negara atau swasta, usaha patungan, dan badan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (UU RI No 20., 2008).

2.2.2. Pengertian UMKM Jajan Pasar

UMKM jajan pasar atau bisnis makanan ringan diartikan sebagai bisnis bersekala rumah tangga yang memiliki banyak peluang. Melihat bahwa jajan pasar yang terdiri dari berbagai jenis olahan kue banyak digemari oleh semua kalangan membuat jajan pasar terus ada dan berkembang seiring berkembangnya zaman.

2.2.3. Ruang Lingkup UMKM

Ruang lingkup UMKM meliputi sektor manufaktur, agroindustri dan industri kreatif.

1. Sektor Manufaktur

Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi barang mentah menjadi bahan jadi untuk dijual.

2. Sektor Agroindustri

Agroindustri berasal dari kata agricultural dan industri yang berarti suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya atau suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian.

3. Sektor Industri Kreatif

Didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Sektor industri ekonomi kreatif meliputi 14 sub sektor, yakni periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain busana, video, film, dan fotografi, permainan interaktif, music, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangannya (Hanim, 2018:34).

2.2.4. Prinsip Pemberdayaan UMKM

Menurut BAB II Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Prinsip Pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
4. Peningkatan daya saing UMKM.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

2.2.5. Kriteria UMKM

Dalam buku UMKM dan bentuk-bentuk Usaha di tuliskan kriteria UMKM menurut UU No 20 tahun 2008 Pasal 6 tentang UMKM dijelaskan sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah:
 - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha kecil adalah:
- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha menengah adalah:
- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (Latifah Hanim, 2018:13).

2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu gambaran atau penjelasan terhadap objek permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Kinerja Aparatur Dinas PMK Bandar Lampung merupakan satu hal yang sangat penting dalam kemajuan UMKM, salah satunya UMKM yang bergerak dibidang olahan rumahan atau jajan pasar. Jajan pasar merupakan olahan yang digemari oleh semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang tua, UMKM jajan pasar masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya kurangnya SDM, kurangnya modal, produksi yang terbatas, penjualan yang belum meluas dan kurangnya pemakaian teknologi dalam pengelolaan UMKM, dengan adanya permasalahan yang telah disebutkan, dibutuhkan kinerja dari aparatur pemerintah untuk dapat menangani permasalahan tersebut.

Menilai kinerja yang diberikan oleh aparatur Dinas PMK Bandar Lampung penulis menggunakan teori kinerja dari Robbins 2006 (dalam Lie, dkk., 2018:2) yang menyatakan terdapat lima indikator untuk menilai kinerja karyawan atau aparatur diantaranya:

1. Kualitas Kerja

Didefinisikan sebagai kemampuan aparatur dalam bekerja dan dikaitkan dengan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan.

2. Kuantitas Kerja

Didefinisikan sebagai seberapa lama aparatur tersebut bekerja setiap harinya.

3. Ketepatan Waktu

Didefinisikan sebagai sesuai atau tidak waktu yang berlangsung di lapangan dengan waktu yang sudah direncanakan.

4. Efektivitas

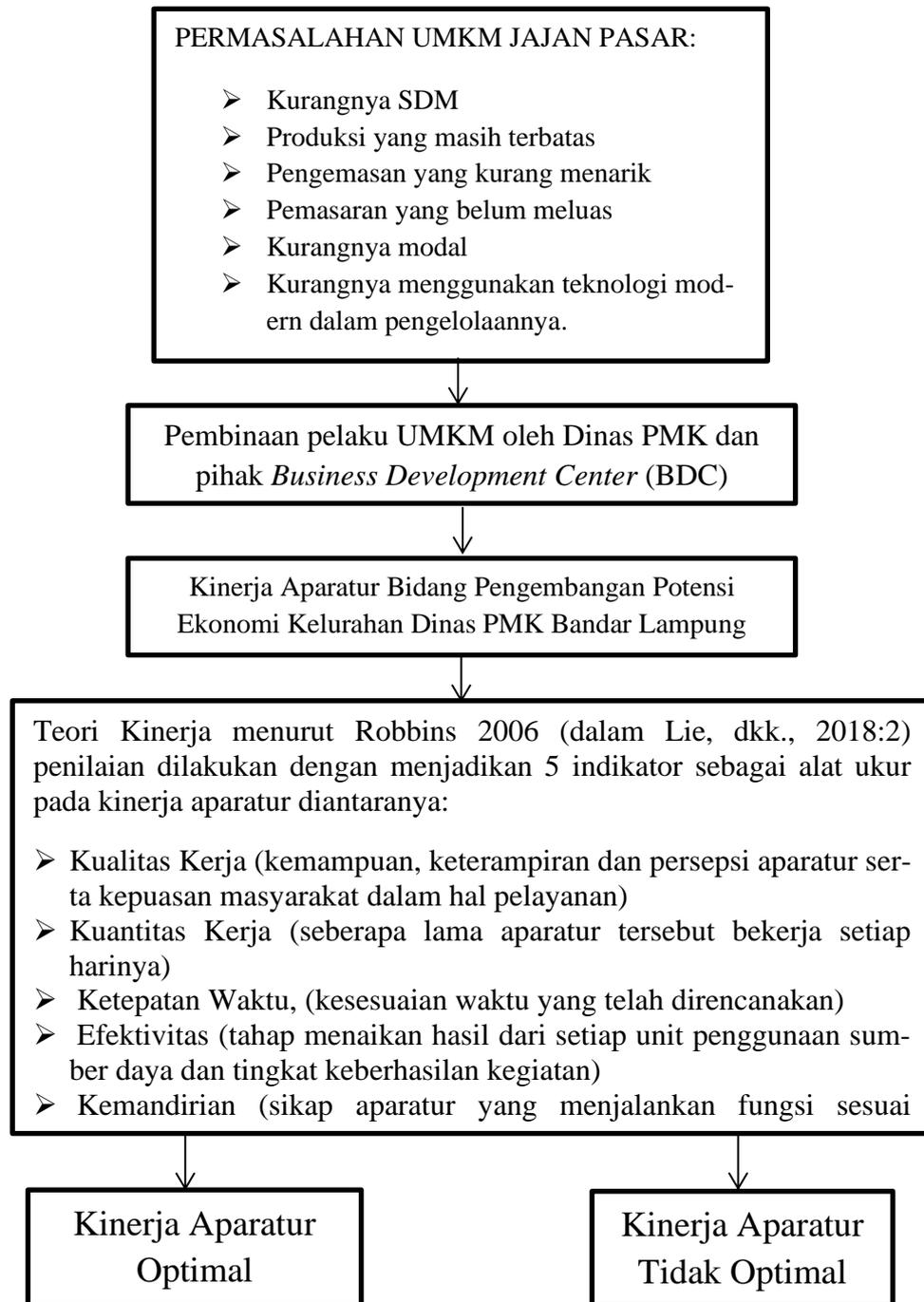
Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, dan bahan baku) yang dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya dan tingkat keberhasilan suatu kegiatan.

5. Kemandirian

Didefinisikan sebagai sikap seorang aparatur yang kedepannya akan menjalankan fungsi kerja sesuai dengan komitmen kerja, atau dapat dikatakan sebagai tingkatan karyawan/aparatur yang memiliki komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap instansinya.

Dengan menggunakan teori tersebut peneliti akan mengetahui kinerja yang diberikan oleh Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pembinaan para pelaku UMKM jajan pasar ini apakah kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dinilai optimal atau tidak optimal dengan teori yang digunakan.

Berikut tampilan kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6). Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif berakar pada alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, mengandalkan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu peneliti dan subjek penelitian Moleong, 2010 (dalam Kusumaastuti, 2019:19).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap fenomena yang terjadi di lapangan dan akan diteliti. Oleh karena itu, untuk memahami fenomena secara mendalam, diperlukan interaksi sosial antara peneliti dengan objek yang diteliti, sehingga fenomena Kinerja Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pembinaan para pelaku UMKM jajan pasar dapat diamati. Peneliti dapat melakukan wawancara atau observasi terhadap fenomena yang diteliti.

3.2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Dinas PMK Bandar Lampung, lokasi ini dipilih peneliti dengan alasan Dinas PMK Bandar Lampung merupakan tempat peneliti melaksanakan magang dengan tujuan untuk memperoleh riset penelitian yang hendak dijadikan skripsi. Oleh sebab itu dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan relevan saat melakukan penelitian.
2. Beberapa Wilayah kelurahan di Kota Bandar Lampung, alasan dipilihnya lokasi tersebut karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung membina beberapa pelaku UMKM jajan pasar dari berbagai kelurahan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung juga memiliki peran yang dominan dalam pemberdayaan kelurahan, oleh karena itu masyarakat kelurahan dianggap sebagai salah satu yang merasakan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pembinaan UMKM jajan pasar.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksud untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan tidak relevan (Moleong, 2002:45). Tujuannya agar penelitian ini memperoleh data sesuai dengan yang dibutuhkan berdasar pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi. Fokus penelitian ini didasarkan pada teori kinerja menurut Robbins 2006 (dalam Lie, dkk., 2018:2) dalam menilai kinerja yang diberikan oleh aparatur Dinas PMK Bandar Lampung dalam kegiatan pembinaan pelaku UMKM jajan pasar, melalui lima indikator yang akan menjadi tolak ukur dalam melihat kinerjanya, adapun lima indikator tersebut diantaranya :

1. Kualitas kerja, dilakukan penilaian mengenai kualitas kerja guna mengetahui keterampilan, kemampuan, dan persepsi aparatur dalam melakukan pembinaan untuk pelaku UMKM jajan pasar serta untuk mengetahui

tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur dalam pembinaan tersebut.

2. Kuantitas kerja, dilakukan penilaian mengenai kuantitas untuk mengetahui seberapa lama aparatur bekerja setiap harinya, sesuai atau tidak dengan peraturan yang diberikan pemerintah mengenai ketentuan jam kerja.
3. Ketepatan waktu, dilakukan penilaian mengenai ketepatan waktu untuk mengetahui sesuai atau tidak waktu yang berjalan dilapangan dengan waktu yang sebelumnya sudah direncanakan.
4. Efektivitas, dilakukan penilaian mengenai efektivitas untuk mengetahui tingkatan sumber daya organisasi yang berupa tenaga, uang, teknologi dan bahan baku, dan melihat tingkat keberhasilan kegiatan pembinaan pelaku UMKM jajan pasar.
5. Kemandirian, dilakukan penilaian mengenai kemandirian untuk mengetahui fungsi kerja aparatur apakah sesuai dengan komitmen kerja.

Berdasarkan teori kinerja peneliti akan melihat optimal atau tidak optimal kinerja aparatur Dinas PMK Bandar Lampung, dengan memberikan penilaian menggunakan lima indikator yang sudah dijelaskan di atas.

3.4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh berkaitan dengan bagaimana kinerja aparatur Dinas PMK Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan UMKM khususnya UMKM yang bergerak dalam bidang jajan pasar. Data tersebut diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama melalui wawancara, wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara dengan informan yang telah ditentukan dan dianggap dapat menjawab pertanyaan yang diberikan.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data informasi yaitu hasil wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Potensi Ekonomi Kelurahan, Staf Pengembangan Potensi Ekonomi Kelurahan, dan tujuh pelaku UMKM yang bergerak pada bidang jajan pasar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung seperti dari dokumen, jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan lainnya yang berupa tulisan yang dianggap dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari Dinas PMK Bandar Lampung terdiri dari laporan akhir kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PMK Bandar Lampung, dan Data Pelaku UMKM Binaan Dinas PMK Bandar Lampung.

3.5. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini informan dipilih dengan pertimbangan tertentu. Informan yang dipilih oleh peneliti tentu memiliki kriteria yaitu informan yang dianggap mampu, mengetahui dan paham dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan membantu peneliti menyelesaikan penelitiannya.

Berikut daftar nama informan yang dipilih peneliti.

Tebel 2. Informan Penelitian

NO	Informan penelitian	Nama	Lokasi Wawancara
1	Kepala Dinas	Jainuddin M.I.P.	Kantor Dinas PMK Bandar Lampung.
2	Kabid pengembangan potensi ekonomi kelurahan	Etty Yuliarna	Kantor Dinas PMK Bandar Lampung.
3	Staf	Boni M. Supriatna	Kantor Dinas PMK Bandar Lampung.
4	Pelaku UMKM Jajan Pasar binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung (sebanyak 7 pelaku UMKM jajan pasar)	1. Septiana	Kediaman ibu Seftiana yang beralamat di Jl. H. Komarudin Gg. By Pass Raya 2 No. 31 LK 1, Kel Rajabasa Raya, Kec. Rajabasa.
		2. Sadaria	Kediaman ibu Sadaria yang beralamat di Jl. H. Komarudin Gg. By Pass Raya 2 No. 8 LK 1, Kel Rajabasa Raya, Kec. Rajabasa.
		3. Selda Ertanti	Kediaman ibu Selda Ertanti yang beralamat di Jl. Danau Toba No. 34 LK II, Kel. Surabaya, Kec. Kedaton.
		4. Septiana Sutarman	Kediaman ibu Septiana Sutarman yang beralamat di Langkapura, Blok J No.1 Kec. Langkapura.
		5. Eli Suwarni	Kediaman ibu Eli Suwarni yang beralamat di Jl. Simangraja No. 9 LK 3 Kel. Kelapa Tiga, Kec Tanjung Karang Pusat.

Tabel 2. Lanjutan

No.	Informan Penelitian	Nama	Lokasi Wawancara
		6. Melani Vilanda	Kediaman ibu Melani Vilanda yang beralamat di Perum Kaliawi Blok C No. 14 LK II, Kel. Kaliawi. Kec. Tanjung Karang Pusat.
		7. Pipit Dian Palupi	Kediaman ibu Pipit Dian Palupi yang beralamat di Jl. Dipo No. 49 LK I, Kel. Sawah Brebes, Kec. Tanjung Karang Timur.

Sumber: Penelit, Tahun 2023

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk memperoleh data, pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2012:224). Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural *setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triangulasi) (sugiyono 2017:194).

Terdapat dua teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif adalah perbincangan yang memiliki tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian tidak hanya sekedar percaka-

pan berkisar informal ke formal, wawancara penelitian ditujukan untuk memperoleh informasi dari satu sisi, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan (Rachmawati, 2007:35). Wawancara dalam penelitian ini berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan mengenai Kinerja Aparatur Dinas PMK Bandar Lampung dalam Pembinaan Pelaku UMKM Bidang Jajan Pasar.

Proses wawancara dilakukan berdasarkan dengan teori yang dipakai yaitu teori kinerja menurut Robbins 2006 (dalam lie, dkk., 2018:2) yang meliputi 5 indikator yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk memperoleh data diantaranya:

1. Kualitas kerja, data yang diperoleh peneliti berupa informasi mengenai kemampuan atau keahlian kerja dan persepsi kerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan pelaku UMKM dan penilaian pelaku UMKM atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur dalam kegiatan tersebut.
2. Kuantitas kerja, data yang diperoleh peneliti berupa informasi mengenai pengakuan dari aparatur mengenai seberapa lama bekerja setiap harinya.
3. Ketepatan waktu, data yang diperoleh berupa informasi terkait kesesuaian jadwal pelaksanaan yang sudah direncanakan dan yang berjalan dilapangan.
4. Efektivitas, data yang diperoleh berupa informasi mengenai kejelasan sumber daya yang digunakan berupa tenaga, uang, teknologi, dan bahan baku. Selain itu terdapat juga kejelasan mengenai tingkat keberhasilan kegiatan pembinaan pelaku UMKM jajan pasar.
5. Kemandirian, data yang diperoleh berupa informasi mengenai fungsi kerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lam-

pung yang bergerak dalam bidang pengembangan potensi ekonomi kelurahan.

Peneliti telah melakukan turun lapangan untuk melakukan wawancara di lokasi yang sudah peneliti pilih sebelumnya. Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang peneliti lakukan:

1. Pada tanggal 15 Februari dan 25 Maret 2023 peneliti mewawancarai Kepala Dinas PMK Bandar Lampung. Bapak Drs. Jainuddin M.I.P. di Kantor Dinas PMK Bandar Lampung pada pukul 11:30-12:05 WIB. Dengan hasil wawancara terlampir.
2. Pada tanggal 03 Februari 2023 peneliti mewawancarai Kabid Pengembangan Potensi Ekonomi Kelurahan Ibu Etty Yuliarna S.Sos., M.M. di Kantor Dinas PMK Bandar Lampung pada pukul 11:16-11:35 WIB. Dengan hasil wawancara terlampir.
3. Pada tanggal 15 Februari 2023 peneliti mewawancarai Staf Pengembangan Potensi Ekonomi Kelurahan Bapak Boni M. Supriatna di Kantor Dinas PMK Bandar Lampung pada pukul 10:40-11:00 WIB. Dengan hasil wawancara terlampir.
4. Pada tanggal 03 Februari 2023 peneliti mewawancarai Pelaku UMKM jajan pasar Ibu Seftiana di Kediannya yang beralamat di Jl. H. Komarudin Gg. By Pass Raya 2 No. 31 LK 1, Kel Rajabasa Raya, Kec. Rajabasa pada pukul 15:00-15:30 WIB. Dengan hasil wawancara terlampir.
5. Pada tanggal 03 Februari 2023 peneliti mewawancarai Pelaku UMKM jajan pasar Ibu Sadaria di Kediannya yang beralamat di Jl. H. Komarudin Gg. By Pass Raya 2 No. 8 LK 1, Kel Rajabasa Raya, Kec. Rajabasa pada pukul 16:15-16:40 WIB. Dengan hasil wawancara terlampir.
6. Pada tanggal 12 Februari 2023 peneliti mewawancarai Pelaku UMKM jajan pasar Ibu Selda Ertanti di Kediannya yang beralamat di Jl. Danau Toba No. 34 LK II, Kel. Surabaya, Kec. Kedaton pada pukul 14:20-14:50 WIB. Dengan hasil wawancara terlampir.

7. Pada tanggal 13 Februari 2023 peneliti mewawancarai Pelaku UMKM jajan pasar Ibu Septiana Sutarman di Kediannya yang beralamat di Langkapura, Blok J No.1 Kec. Langkapura pada pukul 14:30-15:00 WIB. Dengan hasil wawancara terlampir.
8. Pada tanggal 13 Februari 2023 peneliti mewawancarai Pelaku UMKM jajan pasar Ibu Eli Suwarni di Kediannya yang beralamat di Jl. Sisimangraja No. 9 LK 3 Kel. Kelapa Tiga, Kec Tanjung Karang Pusat pada pukul 15:15-15:40 WIB. Dengan hasil wawancara terlampir.
9. Pada tanggal 13 Februari 2023 peneliti mewawancarai Pelaku UMKM jajan pasar Ibu Melani Vilanda di Kediannya yang beralamat di Perum Kaliawi Blok C No. 14 LK II, Kel. Kaliawi. Kec. Tanjung Karang Pusat pada pukul 16:05-16:25 WIB. Dengan hasil wawancara terlampir.
10. Pada tanggal 13 Februari 2023 peneliti mewawancarai Pelaku UMKM jajan pasar Ibu Pipit Dian Palupi di Kediannya yang beralamat di Jl. Dipo No. 49 LK I, Kel. Sawah Brebes, Kec. Tanjung Karang Timur pada pukul 16:56-17:20 WIB. Dengan hasil wawancara terlampir.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan sketsa. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, dan film (Sugiyono, 2017:174).

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dokumentasi berisi tentang dokumen pelaksanaan pembinaan pelaku UMKM, laporan akhir kegiatan, dan data pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu peneliti juga mengumpulkan foto-foto kegiatan pembinaan UMKM jajan pasar yang telah terlaksana, catatan wawancara ditulis langsung pada panduan wawancara, rekaman dan foto-foto saat wawancara di-

ambil menggunakan handphone dengan tujuan untuk memudahkan jika ada hal penting yang terlewat oleh peneliti, peneliti dapat memutar ulang rekamannya maupun membuka ulang catatannya.

Tabel 3. Dokumentasi Mengenai Lima Indikator Kinerja Menurut Robbins 2006 (dalam Lie, dkk., 2018:2)

No.	Indikator	Dokumentasi
1	Kualitas Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada poin (a). ➤ Dokumentasi kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas PMK Bandar Lampung dengan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pembinaan pelaku UMKM. ➤ Dokumentasi berita acara rapat. ➤ Dokumentasi kegiatan pembinaan pelaku UMKM.
2	Kuantitas Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berupa Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 16/2022. ➤ Berupa Surat Pengumuman Nomor 800/693/1/1.90/2020 tentang Penyesuaian Jam Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. ➤ Dokumentasi absensi aparatur Dinas PMK Bandar Lampung. ➤ Dokumentasi kegiatan dinas diluar kantor.
3	Ketepatan Waktu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berupa Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik pasal 4 dan pasal 21. ➤ Berupa jadwal kegiatan pembinaan pelaku UMKM yang dilampirkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.
4	Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berupa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. ➤ Dokumentasi kegiatan pembinaan pelaku UMKM. ➤ Dokumentasi pembukaan gerai sebagai fasilitas untuk para pelaku UMKM dalam memasarkan produk olahannya.

Tabel 3. Lanjutan

No.	Indikator	Dokumentasi
5	Kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berupa Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas PMK Bandar Lampung Pasal 11. ➤ Dokumentasi aparatur Dinas PMK Bandar Lampung yang sedang melaksanakan fungsinya sesuai dengan komitmen kerja.

Sumber: Peneliti, 2023

3.7. Teknik Pengolahan Data

1. *Editing* Data

Editing data merupakan tahapan memeriksa kembali hasil dari wawancara dan dokumentasi, pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan kesesuaian pertanyaan dan jawaban yang diajukan peneliti pada informan saat wawancara, agar peneliti dapat mengetahui kelengkapan informasi yang diperoleh.

Pada tahap ini data yang tidak relevan akan disingkirkan. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas PMK Bandar Lampung, Kabid Pengembangan Potensi Ekonomi Kelurahan, Staf, dan tujuh pelaku UMKM yang tidak relevan akan dihilangkan, sementara data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Data yang dilakukan proses *editing* adalah hasil wawancara yang belum memenuhi kaidah penulisan ilmiah sesuai ejaan yang disempurnakan atau masih bersifat mentah sebagaimana terlampir pada lambiran hasil wawancara yang sesuai dengan perkataan informan.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna yang lebih mendalam dan luas untuk hasil penelitian. Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberi ulasan dari berbagai data yang sudah dilakukan proses *editing*, pelaksanaan interpretasi data yaitu memberikan penjelasan berupa kalimat narasi maupun deskriptif dari gabungan hasil wawancara dan dokumentasi.

Pada proses ini, peneliti melakukan pencarian makna dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan, hasil wawancara yang telah memiliki makna akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020 : 131).

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu dianggap perlunya dicatat secara teliti dan lebih rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama penelitian ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, sehingga untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, mer-

eduksi data berarti merangkum, memilah, dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, artinya data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya dan mencari lagi bila diperlukan. Dalam reduksi data dapat pula dibantu dengan alat elektronik guna mempermudah proses reduksi menurut Miles dan Huberman (dalam Fadli, 2021:44).

Pada penelitian ini peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh dengan memfokuskan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku UMKM jajan pasar menggunakan teori kinerja menurut Robbins 2006 (dalam Lie, dkk., 2018:2) yang memiliki lima indikator.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan menyusun sekumpulan informasi, sehingga memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami (Rijali, 2018:18). Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini adalah kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan pelaku UMKM jajan pasar.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif biasanya ditulis berupa penjelasan, mencari tahu arti benda-benda, mencatat alur sebab akibat dan proposisi (kalimat yang memiliki arti penuh atau utuh) hal ini dilakukan demi mempertajam informasi yang sebelumnya belum jelas. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikirkan ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan,

(3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain (Rijali, 2018:18).

Penarikan kesimpulan menjadi tahap akhir pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Langkah selanjutnya yaitu menulis hasil penelitian secara lengkap dan jelas.

3.9. Teknik Validasi Data

Terdapat beberapa macam teknik validasi data dalam penelitian kualitatif, namun pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi Data.

Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu dari luar penelitian itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding pada data tersebut. Tujuan menggunakan Triangulasi yaitu untuk mendapatkan data yang benar-benar absah.

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2014:241).

Terdapat beberapa macam triangulasi data diantaranya, triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi peneliti dan triangulasi metode, namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan triangulasi metode, triangulasi metode yaitu menguji keabsahan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda (Sugiyono,

2016:274), maka peneliti melakukan pengecekan untuk memastikan data mana yang dianggap benar menggunakan sudut pandang yang berbeda, data diperoleh dengan wawancara, kemudia dicek dengan dokumentasi, teknik ini dilakukan untuk memastikan data yang dihasilkan dapat dianggap benar.

IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Pembinaan UMKM dan Tujuan Adanya Pembinaan Pelaku UMKM Jajan Pasar

Pembinaan adalah pemberian fasilitas, bimbingan dan pendampingan dalam proses pengembangan. Pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam penelitian ini adalah Dinas PMK Bandar Lampung dan juga pihak BDC. Mengenai tata cara dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UMKM, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 1998 yang mana pembinaan dan pengembangan UMKM dilakukan dengan terarah dan terpadu untuk mewujudkan UMKM yang mandiri sehingga usaha tersebut dapat berkembang.

Pembinaan pelaku UMKM dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh UMKM, menyiapkan program pembinaan dan pengembangan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh UMKM, melaksanakan program pembinaan yang telah disiapkan, dan mengawasi kegiatan dari program pembinaan dan pengembangan UMKM adanya ruang lingkup pembinaan meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran dan SDM, dan teknologi.

Tujuan adanya pembinaan pelaku UMKM jajan pasar adalah mewujudkan struktur perekonomian nasional dengan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha mandiri serta meningkatkan perannya dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

4.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, Dinas PMK merupakan unsur pelaksana otonom daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selain itu, untuk tugas Dinas PMK Bandar Lampung berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2021 ialah Dinas PMK memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Tujuan Dan Sasaran Tugas Fungsi Pokok

a. Tujuan

- Meningkatkan kemampuan dan daya saing ekonomi masyarakat.
- Meningkatnya keberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

b. Sasaran

- Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat.
- Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan dan meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

4.4. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 maka Dinas PMK Bandar Lampung ditugaskan pada misi ke 4. Adapun misi tersebut yakni, “Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.” Selain itu dalam kapasitasnya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, Dinas PMK Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan, khususnya dalam meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam membangun penguatan struktur ekonomi daerah dan penanggulangan kemiskinan. Pada lingkup tersebut, maka sebagai Organisasi Perangkat Daerah Dinas PMK Bandar Lampung memformulasikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan			
Visi	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.		
Misi	Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian.	Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.	Mendorong peningkatan partisipasi dari semua elemen masyarakat.	Melakukan identifikasi sumber daya masyarakat untuk dibina melalui pembekalan, sosialisasi, edukasi dan pendampingan aksi.

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2023

4.5. *Business Development Center (BDC)*

Business Development Center (BDC) merupakan salah satu kegiatan dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terkait penghidupan masyarakat. BDC yang ada di tingkat kabupaten/kota ini melakukan pengembangan produk unggulan atau usaha yang berpotensi untuk dikembangkan dan pendampingan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM). Diharapkan melalui BDC peningkatan daya beli masyarakat bisa terdorong. BDC mempunyai peran dan fungsi sebagai lembaga untuk memberikan pelayanan dan penguatan kapasitas (*capacity building*), intermediasi bisnis dan advokasi kepada KSM dan stakeholders terkait. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pengembangan usaha KSM, khususnya terkait omzet, keuntungan dan aset KSM sehingga usaha KSM mengalami peningkatan dan berdampak pada peningkatan pendapatan.

Dengan adanya peran BDC yang menjadi sarana untuk meningkatkan penghidupan masyarakat dalam bidang ekonomi maka, Pemerintah Kota Bandar Lampung menerima dan mengoptimalkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta stakeholders untuk mengawal BDC menjadi sarana yang mampu memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dengan cara melakukan pembinaan, penguatan kapasitas, peningkatan kualitas produk, serta meningkatkan produksi dan pemasaran produk milik KSM.

4.6. Tujuan Adanya *Business Development Center (BDC)*

1. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan BDC untuk mengembangkan usaha KSM yang berkelanjutan di wilayahnya.
2. Mewujudkan BDC sebagai simpul jaringan usaha dan sarana pengembangan KSM yang mencakup pengembangan KSM pemasaran, produksi, SDM, pembiayaan serta menjadi penghubung usaha dalam pengembangan ekonomi lokal.

3. Mewujudkan jejaring usaha-usaha kelompok masyarakat dengan dunia usaha dan kelompok peduli (*Stakeholders*)lainnya.

4.7. Kegiatan Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dan *Business Development Center* (BDC)

1. Pendampingan kepada usaha mikro agar mengembangkan usaha KSM bersekala mikro menjadi usaha berskala kecil, kegiatannya sebagai berikut:
 - Pengembangan Produk
 - Pengembangan Pemasaran
 - Pengembangan Kemitraan
2. Peningkatan kapasitas keahlian KSM melalui pelatihan *vocational*
Komite BDC Kota Bandar Lampung telah melakukan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kepada KSM dampingan BDC agar adanya peningkatan pengembangan ekonomi lokal, usaha ekonomi produktif dan kreatif. Kegiatannya sebagai berikut:
 - Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat berupa pelatihan, *on the job training*, studi banding, pendampingan usaha, dan sebagainya.
 - Pengembangan produk, dapat berupa inovasi dan variasi produk, diversifikasi produk, membuat produk baru, perbaikan mutu kemasan dan lain-lain.
 - Pengembangan pasar, dapat berupa inovasi promosi, pengembangan jaringan pasar, perluasan jangkauan pemasaran dan lain-lain.
 - Fasilitasi perizinan dan legalitas usaha bagi KMS dampingan BDC.

3. Bantuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran dan tugas komite BDC untuk peningkatan usaha kecil/KSM Kota Bandar Lampung. Kegiatannya sebagai berikut:
 - Pemerintah kota Bandar Lampung memberikan kontribusi operasional kepada komite BDC dalam melaksanakan peran dan tugas yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung melalui kegiatan BDC.
 - Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan dukungan fasilitas berupa rumah toko/gerai pemasaran produk KSM binaan BDC, sehingga komite BDC memiliki tempat usaha yang layak bagi kepentingan peningkatan ekonomi KSM Kota Bandar Lampung.
 - Komite BDC melakukan pemetaan produk KSM yang sesuai dengan produk unggulan pemerintah daerah kota Bandar Lampung.

4.8. Kegiatan Pengembangan Usaha Pelaku UMKM Di Bandar Lampung

1. BDC memfasilitasi perluasan pemasaran produk yang dimiliki oleh pelaku UMKM agar produknya dapat diterima oleh pasar/konsumen, contohnya memfasilitasi pemasaran produk pelaku UMKM ke hotel-hotel yang ada di Kota Bandar Lampung, pasar tradisional dan pasar modern.
2. BDC memfasilitasi promosi produk milik pelaku UMKM untuk dapat diterima oleh aparat pemerintah daerah Kota Bandar Lampung serta masyarakat Kota Bandar Lampung melalui promosi bazar, melalui pameran Lampung *Fire* dan acara lainnya.
3. BDC bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan gerai/ruko untuk tempat usaha seluruh pelaku UMKM binaan BDC Kota Bandar Lampung.

4.9. Sumber Keuangan Komite BDC Kota Bandar Lampung

Sumber keuangan komite Bandar Lampung berasal dari:

- Bantuan pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dititipkan ke rekening komite BDC.
- Bantuan Pemerintah Daerah (APBD) sebagai dana biaya operasional komite BDC.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian Kinerja Aparatur Dinas PMK Bandar Lampung dalam kegiatan pembinaan pelaku UMKM dapat disimpulkan dinilai optimal karena hanya terdapat 1 indikator yang tidak terpenuhi dan 4 indikator lainnya terpenuhi. Setelah adanya kegiatan pembinaan diperoleh keberhasilan dan tujuan pembinaan yaitu dapat memajukan usaha pelaku UMKM dan menambah penghasilan pelaku UMKM, berikut penjelasannya:

1. Indikator kualitas kerja dinilai optimal dibuktikan dengan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian saat bertugas, dan pelaku UMKM merasa cukup puas atas pelayanannya.
2. Indikator kuantitas kerja dinilai optimal karena Aparatur Dinas PMK Bandar Lampung sudah menerapkan jam kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Indikator ketepatan waktu dinilai tidak optimal karena pada saat pembinaan pelaku UMKM jajan pasar waktu yang berjalan di lapangan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan meskipun keterlambatan memulai acara dikarenakan narasumber yang terlambat hadir dan narasumber tersebut bukan bagian dari aparatur, tetapi kegiatan tersebut sepenuhnya tanggung jawab dari seluruh aparatur yang bertugas.
4. Indikator efektivitas dinilai optimal karena dalam kegiatan pembinaan pelaku UMKM jajan pasar sudah menggunakan sumber daya berupa tenaga, uang, teknologi dan bahan baku serta kegiatan pembinaan ini diakui membantu pelaku UMKM dalam hal produksi, pengemasan hingga pemasaran, pelaku UMKM mengalami adanya kenaikan pendapatan.

5. Indikator kemandirian dinilai optimal karena dengan adanya kegiatan pembinaan pelaku UMKM, aparaturnya menyalurkan apa yang menjadi tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Ketepatan waktu, kepada aparaturnya Dinas PMK Bandar Lampung, pihak BDC, dan aparaturnya dinas lain yang terlibat dalam kegiatan pembinaan pelaku UMKM jika mengalami permasalahan narasumber terlambat sebaiknya acara diisi dengan tanya jawab atau berbagi pengalaman sesama pelaku UMKM yang dipimpin oleh aparaturnya agar lebih kondusif dan ketika menunggu pelaku UMKM tidak merasa dirugikan atas waktu yang terbuang, karena acara tersebut merupakan tanggung jawab aparaturnya yang bertugas sehingga harus memberikan yang terbaik untuk seluruh pelaku UMKM yang datang pada kegiatan pembinaan.
2. Efektivitas, dalam indikator ini sebenarnya sudah optimal karena telah menggunakan sumber daya organisasi seperti tenaga, uang, teknologi dan bahan baku dan pembinaan tersebut juga dinyatakan berhasil namun ditemukan adanya bahan baku yang kurang pada saat kegiatan praktik, sebaiknya diperhitungkan secara maksimal bahan baku yang digunakan agar pada saat kegiatan pembinaan tidak terjadi kekurangan bahan baku dan tidak mengganggu kegiatan praktik pembuatan olahan jajan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala. *Jurnal Governance*. 1(1): 1–8.
- Alim, Syahirul., Zaili Rusli., dan M. H. (2019). Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 15(3), 428.
- Anggraini, Dwi, Feni., Imam Hardjanto., dan Ainul Hayat. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kec. Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. 1(6): 1286-1295.
- Aprilia, Nita., dkk. (2021). Pembinaan Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tempe di Kampung Karya Bakti. *Community Engagement & Emergence Journal*. 3(1): 10-18.
- Ardianto, Yoni. (2019). “Memahami Metode Penelitian Kualitatif”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>. Diakses pada 1 November 2022.
- Askolani., Ressi J Machdalena. (2016). Pengaruh motivasi dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Inti (PERSERO) Bandung. *Jurnal Riset Manajemen*. 31-43.
- Atmaja, J. (2018). Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Pada Bank BJB. *Jurnal Ecodemica*. 2(1): 49-63.
- Aulia. (2019). Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kinerja dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Banjarbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan* . 1(1): 1-13.
- Bachri, Bachtiar S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1): 46-62.
- Fadilah, A., Syahidah, A. nur'azmi, Risqiana, A., Nurmaulida, A. sofa, Masfupah, D. D., dan Arumsari, C. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(4): 892–896.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif.

21(1), 33–54.

Firdaus, Gusti Muhammad Ferry. 2018. “Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Hypermart Berbasis Program Kemitraan Kota Palangka Raya.

Florita, Aina., Jumiaty., dan Adil Mubarak. (2018). Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik*. 1(1): 1-11.

Hanim, L. (2018). *UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press.

Hashfi, Mailul. 2010. “Pengaruh Persepsi Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Kereta Api Daop IV Semarang”. Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Hasibuan, M. S. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cetakan ke 18) (Revisi ed). Jakarta:PT Bumi Askara.

Jayani, Dwi Hadyan. (2021). “Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia”.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/umkm/-indonesia-bertambah-198-pada-2019>. Diakses pada 18 Desember 2022.

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2022). “Pemberdayaan UMKM”.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/berita-terbaru/3015-pemberdayaan-umkm.html>. Diakses pada 18 Desember 2022.

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 358/III.12/HK/2021.

Lathifah, Ayuni. 2019. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”. Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Lathifah, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal: Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 10.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

Lie, Tjong Fei., Siagian, Hotlan. (2018). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja pada CV. Union Event Planner. *Jurnal Agora*. 6(1): 1-6.

Mangkunegara, A. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia* Perusahaan.

Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.

Megantoro, Dwi. (2015). Pengaruh Keterampilan, Pengalaman, Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap UKM. 1-14.

Moloeng, Lexy, J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moloeng, Lexy, J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muslim, Nur'aini., dan Irawan Nasution. (2014). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pantai Labu Pekan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. 2(2): 99-110.

Niode, Idris Yanto. (2009). Sektor UMKM Di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Oikos-Nomos*. 2(1): (1-10).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 52 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Pasal 11.

Profil *Bussines Development Center* (BDC) Kota Bandar Lampung

Prov Jateng, Yandip. 2018. "UMKM Pernah Jadi Penyelamat Saat Krisis". <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/umkm-pernah-jadi-penyelamat-saat-krisis/>. Diakses pada 1 November 2022.

Rachmawati, Imami Nur. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara, *Jurnal Keperawatan*. 11(1), 35-40.

Rahayu, Esti. (2015). Kinerja Aparatur Pemerintah Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak. *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*. 4(2): 1-17.

Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. 17(33): 81-95.

Rosman. (2014). Analisis Kinerja Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2): 2753-2766.

Robbins dan Kumar. (1995). Buku Ajar Patologi. Edisi 4. Jakarta. EGC

Silaen, Novia Ruth., dkk. (2021). *Kinerja Karyawan*. Bandung: Whidina Bhakti

Persada Bandung.

- Sina, Irmgard. Y. N., dan Gradiana Tefa. (2019). Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pelestarian Tenun Ikat Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 7(1), 1–15.
- Soemaragara, Rizky Darmawan. (2006). Persepsi Peran, Konsistensi Peran, dan Kinerja. 270-287.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV.
- Surat Edaran Menteri PANRB No. 16/2022.
- Surat Kementerian Agama Republik Indonesia perihal Kewajiban Mentaati Ketentuan Jam Kerja.
- Surat Pengumuman No. 800/693/1.09/2020 Tentang Penyesuaian Jam Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang- Undang No. 20. (2008). Usaha Mikro Kecil Menengah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 4.
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Widisandika. 2019. “Pemkot Dorong Jajanan Pasar Masuk Hotel”. <https://radarlampung.disway.id/read/195574/pemkot-dorong-jajanan-pasar-masuk-hotel>. Diakses pada 20 Juni 2023.
- Yuniarti, Rina., dkk. (2021). *Kinerja Karyawan Tinjauan Teori dan Praktis*. Bandung: Widia Bhakti Persada Bandung.